

Diskursus Agama dan Budaya dalam Konteks Minahasa sebagai Wujud Kritik Ideologi-Imajinasi Kolonialisme

Thiosani Frinsly Kaat^{1*}

*Corresponding Author: 752022023@student.uksw.edu

¹Program Pascasarjana Magister Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.29658

Abstract

The essence of this article analyze the ideology-imagination of colonialism, namely, Christianity as a super-power religion which until now has the power to legitimize people's wrong and right actions. The research instrument uses qualitative methods with an analytical-descriptive approach to see how context creates meaning. Through literature studies to find data that supports the imagination of the ideology of colonialism in the structural body of Minahasa society which has become in-itself. Ideology has become the truth of doctrine, imagination, religion which leads society to adhere to ideological fantasies or a single truth and reject narratives in the name of culture. Religion. Especially Christianity, has dominated Minahasan society and taken over traditional discourses to bring order to the public. Meanwhile, cultural narratives experience marginalization as a result of systemic violence in the name of religion which has become a frightening monster. Through Slavoj Žižek's concept of ideological criticism, this research openly contributes to criticizing the ideology-imagination of colonialism that is still persistent in the structural body of Minahasa. Based on the explanation above, this article concludes that colonialist ideologies, namely religion and imperial politics, are still practiced in the Minahasan context so they tend to ignore cultural narratives.

Abstrak

Esensi artikel ini menganalisis mengenai ideologi-imajinasi kolonialisme yaitu, kekristenan sebagai agama *super-power* (kekuatan) yang sampai saat ini memiliki kuasa melegitimasi salah-benar tindakan masyarakat. Instrumen penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif untuk melihat bagaimana konteks melahirkan makna. Melalui studi kepustakaan untuk menemukan data-data yang mendukung. Imajinasi ideologi kolonialisme pada tubuh struktural masyarakat Minahasa telah menjadi ada dalam dirinya sendiri (*in-itself*). Ideologi telah menjadi kebenaran doktrin, imajinasi, agama yang menuntun masyarakat berada dalam fantasi ideologis atau kebenaran tunggal dan menolak narasi atas nama kebudayaan. Agama, khususnya kekristenan telah mendominasi masyarakat Minahasa dan mengambil alih wacana-wacana adat untuk menertibkan publik. Sedangkan narasi-narasi kultural mengalami keterpinggiran akibat dari kekerasan sistemik atas nama agama yang menjadi monster menakutkan. Lewat konsep kritik ideologi dari Slavoj Žižek, penelitian ini secara terbuka berkontribusi mengkritik ideologi-imajinasi kolonialisme yang masih langgeng dalam tubuh struktural Minahasa. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berkesimpulan bahwa, ideologi-imajinasi kolonialisme yaitu, agama, politik imperial masih dipraktikkan dalam konteks Minahasa sehingga cenderung mengabaikan narasi-narasi kultural.

Keywords

Agama, Budaya, Ideologi-Imajinasi, Kolonialisme, Minahasa

Article History

Received October, 14
Revised December, 25
Accepted December, 28
Published December, 31

Corresponding Author

Thiosani Frinsly Kaat
Universitas Kristen Satya
Wacana, Salatiga. Jl
Diponegoro. Kota Salatiga,
Jawa Tengah.

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan mengkritik secara teoritis dan metodologis mengenai imajinasi-ideologi kolonialisme dalam diskursus agama dan budaya konteks Minahasa. Kritik Imajinasi-ideologi kolonialisme dalam konteks Minahasa sebab ditandai dengan langgengnya praktik-praktik politik imperialisme pada struktural penguasa sehingga cenderung mengesampingkan narasi-narasi dari pinggir. Peminggiran terjadi karena kontrol. Kekristenan sebagai agama *bio-power* (kekuatan mengontrol) kehidupan religiusitas masyarakat Minahasa telah mengambil alih ruang-ruang publik dan menjadikan teologi representasi ideologis sekaligus instrumen elit melegitimasi benar-salah tindakan masyarakat. Pada sisi lain, relasi antara agama dan budaya di Minahasa selama ini belum menemukan titik temu sebab kebenaran atas nama agama berbasis pada kitab suci sedangkan masyarakat yang masih memegang tradisi kebudayaan Minahasa bermuara pada budaya lisan. Karena itu, terjadi perbenturan perspektif dalam hal kebenaran. Walau demikian, kekristenan telah menjadi agama *super-power* (kekuatan) yang mendominasi serta menghegemoni kehidupan sosio-religi masyarakat.

Minahasa merupakan satu wilayah bekas kolonisasi bangsa Eropa khususnya Belanda yang datang untuk berdagang dan memperkenalkan kepercayaan baru yaitu Kristen. Pada masa kedudukan Belanda di Minahasa, masyarakat mengalami banyak perubahan sosial termasuk kepercayaan. Belanda melalui lembaga *Nederlandsch Zendeling Genootschaap* (serikat misionaris negeri Belanda) singkatan NZG (Pinontoan, 2019) menyebarkan Protestan secara intensif dengan mendirikan sekolah untuk guru, pembantu pendeta dan sekolah penginjilan di Minahasa (Marzuki, 2020). Pada dasarnya sekolah-sekolah yang didirikan tersebut merupakan buah dari abad *renaissance* (pencerahan) dibawa oleh Kristen Pietis sehingga cenderung mengajarkan produksi pengetahuan berdasarkan gaya rasionalitas dan menolak diskursus budaya lisan atau mitos. Gaya produksi pengetahuan dalam konteks Minahasa telah didominasi oleh kebudayaan baru yaitu kekristenan sehingga narasi-narasi yang mengatasnamakan budaya Minahasa terpinggirkan.

Sejak kolonial dan kekristenan mendominasi sosio-kultural masyarakat Minahasa nilai-nilai kearifan lokal seperti *Tumalinga si ko'ko* (mendengar suara burung) mengalami degradasi makna karena direkonstruksi oleh para teolog-teolog kristiani (Lasut, 2022). Sebelumnya kolonial dan kekristenan pernah mengalami penolakan serta perlawanan dari para pemimpin tradisional masyarakat Minahasa karena dianggap akan meminggirkan budaya (Thufail dan Ramstedt, 2011). Walau demikian, para elit lokal berhasil disiasati oleh kolonial melalui mediasi dan pendidikan kristiani sehingga terjadi kontrol dan pengekangan gerakan atau *constraining* (limitasi) terhadap gerak politis elit-elit lokal Minahasa lampau dalam memproduksi pengetahuan kultural dengan bebas (Kimbali, 2015). Perubahan yang terjadi pada struktur elit Minahasa tidak bisa dipisahkan dengan wacana-wacana kolonial yang mengubahnya. Karena itu, entitas antara pola kekuasaan dalam konteks kolonialisme berkuasa di Minahasa telah ditransmisikan kepada generasi atau para penguasa Minahasa zaman kontemporer. Maka, dapat dikatakan imajinasi kolonialisme masih langgeng dan telah menjadi ideologi yang mengontrol hasrat para penguasa.

Penelitian terdahulu telah melihat relasi antara agama khususnya kekristen dan budaya berdasarkan kontekstualisasi teologi seperti eksplorasi dari Heydemans yang melihat narasi kearifan lokal serta teologi kontekstualisasi (Heydemans, Nainggolan, Manullang, 2021). Senada dengan Heydemans, Denni Pinontoan juga mengeksplorasi bagaimana kekristenan dan diskursus

budaya Minahasa dapat bertemu lewat simbol walau sering distigmatisasi sinkretis (Pinontoan, 2020). Sedangkan perubahan sosial telah dianalisis oleh Hun Pinatik melalui jurnalnya tentang dasar-dasar perubahan sosial pada ritual di situs-situs suci dalam konteks Minahasa (Pinatik, 2021). Namun, penelitian sebelumnya belum melihat secara dialektis bagaimana relasi antara agama dan budaya dalam konteks Minahasa masih belum menemukan titik temu sebab terus-menerus memperebutkan panggung atau perhatian publik. Kemudian, wacana imajinasi-ideologi kolonialisme yang masih langgeng pada tubuh struktural penguasa di Minahasa ditandai dengan kehadiran para tokoh agamawan (*white collar*), politikus dan birokrat berorientasi mengabsolutkan kekuasaan mereka.

Secara historis, struktur kepemimpinan para elit kekinian di Minahasa tidak dapat dipisahkan dari jejak kolonialisme yang mendidiknya melalui pendidikan kristiani. Pertalian tradisional *white collar*, politikus dan birokrat secara simbolis mengambil alih kebijakan publik lewat wacana-wacana normalisasi atau pembiasaan. Pada dasarnya, kerja elit kekinian dalam konteks Minahasa bersifat simbiosis mutualisme dan berhasil menciptakan kultur baru yaitu nepotisme, demokrasi pipa serta budaya kepatuhan melalui kontrol yang dikeluarkan berdasarkan wacana teologis. Karenanya, wacana imajinasi kolonialisme dalam konteks Minahasa masih mengakar sampai sekarang dan berhasil mengkonstruksi struktur kepemimpinan para elit Minahasa. Konstruksi kolonial terhadap struktur elit di Minahasa berhasil menghegemoni struktur-struktur kehidupan sosio-religi masyarakat.

Sebelumnya para elit lokal dalam konteks Minahasa yaitu, *wali'an* (pemimpin agama) *tona'as/ukung/walak* (pemimpin negeri) berfungsi sebagai pengawas stabilitas sosial (Malensang, 2016) termasuk menjamin kebebasan masyarakat untuk memproduksi ruang pengetahuan berbasis kultural tanpa intimidasi dan intervensi kekuasaan. Para *tona'as*, *ukung* dan *walian* dikonstruksi oleh kolonialisme menjadi *white collar* politikus, birokrat, sebagai representasi elit kekinian Minahasa. Pada dasarnya tiga bentuk supremasi hasil konstruksi kolonialisme terhadap elit lokal Minahasa memiliki kuasa untuk mengontrol masyarakat adat dalam memproduksi dengan bebas narasi kearifan lokal di Minahasa. Berdasarkan eksposisi di atas, dapat dikatakan masyarakat Minahasa mengalami hegemoni oleh penguasa dan dalam kesadaran melanggengkan imajinasi-ideologi kolonialisme sehingga perlu untuk dikritik secara teoritis dan metodologis.

Metode penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif untuk menguraikan makna yang lahir berdasarkan situasi problematik. Kualitatif merupakan metode yang dipakai oleh bidang ilmu sosial dalam mengeksplorasi secara holistik dan mendasar tentang makna (Creswell, 2009). Karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif. Pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Maksud dari pendekatan analitis-deskriptif adalah mengeksplorasi secara dialektis dengan teoritis serta metodologis data-data yang ditemukan melalui studi literatur dan perbandingannya dengan sebuah fenomena beragama dalam konteks Minahasa dikarenakan agama menjadi kekuatan mengontrol kehidupan spiritual masyarakat. Selain itu, pendekatan analitis-deskriptif lebih menekankan analisis mendalam mengenai narasi-narasi yang lahir berdasarkan observasi lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah melihat secara teoritis bagaimana proses transmisi kekuasaan lewat lembaga agama telah mengkrystal dan menjadi ideologi. Kemudian studi literatur

dan observasi lapangan serta gejala-gejala kristalisasi kekuasaan yang lahir berdasarkan wacana imajinasi-ideologi kolonialisme sebab dilanggengkan oleh narasi atas nama agama.

Kerangka Teoritis

Narasi Kritik

Penelitian ini menggunakan konsep teoritis dari Slavoj Žižek untuk melihat ideologi dalam bingkai agama, ide, doktrin yang melahirkan kebenaran tunggal. Žižek menggambarkan kritik ideologi sebagai metode untuk keterlepasan substantif manusia bebas. Melalui kritik ideologi dari Žižek, penelitian ini melihat bagaimana agama khususnya kekristenan merepresentasikan ideologi dan sebagai kepercayaan yang diperkenalkan oleh kolonial masih langgeng mempraktikkan budaya politik imperialisme serta demokrasi terstruktur. Selain itu, agama dan struktur dalam konteks Minahasa cenderung mengesampingkan kesadaran kultural masyarakat seperti kebebasan memproduksi pengetahuan kultural berbasis pada tradisi-tradisi lisan atau mitos. Kemudian, dikombinasikan dengan kritik agama dari Karl Marx, untuk menggugat corak agamis yang cenderung menjadi *super-power* dalam mengontrol salah-benar tindakan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat teralienasi begitu saja. Dalam bingkai ini, menjadikan langkah awal untuk membatalkan narasi superioritas agama sebagai fantasi ideologis dan instrumen elit menertibkan publik yang menjadikan masyarakat berada dalam pengawasan penguasa. Walau budaya kritis sebagai instrumen dalam menertibkan penguasa kembali kepada jalan kebijakan benar telah mengalami pembatalan oleh para elit yang jahat secara struktural.

Kejahatan struktural berpusat pada bagaimana cara kerja elit secara birokratis mengambil alih kehidupan masyarakat lewat kontrol sosial. Meniadakan narasi-narasi kritis secara terstruktur telah menciptakan wacana ideologis seperti ide, doktrin, pengekangan imajinasi, kepercayaan sehingga bermuara pada diskursus kebenaran tunggal. Bagi Žižek, proses konstruktif terbentuknya daya ide, doktrin merupakan instrumen terciptanya ideologi dan menjadi fantasi dalam mengubah kesadaran masyarakat. Analisis terhadap ideologi dapat menyingkap mekanisme misteri mengenai kehidupan sosial yang menunjukkan terjadinya perubahan seperti daya kekritisannya masyarakat atau sifat apatis terhadap isu-isu publik. Menurut Žižek ada beberapa gaya yang mengkonstruksi gagasan mengenai ideologi, pertama (*in-itself*). Ideologi ada di dalam dirinya sendiri diartikulasikan sebagai sebuah gagasan yang lahir melalui diri seperti, ide, kepercayaan, kebenaran (Žižek, 1994).

Ideologi *in-itself* menjadikan manusia sebagai subjek pencipta kebenaran tunggal yang telah mengalami distorsi secara sistematis atas dasar pengaruh dominasi dan kepentingan sosial serta terlepas dari makna dalam ruang publik. Kedua, ideologi (*in-itself to for-itself*) ideologi dari dalam diri menuju dirinya sendiri. Secara esensial ideologi *in-itself to for-itself* merupakan gagasan yang melahirkan agama, pendidikan, keluarga, budaya, pasar, politik (Ferreter, 2006). Ideologi tersebut dapat diartikan sebagai representasi dari diri kembali kepada diri berdasarkan mekanisme normatif, fungsional ataupun institusi. Ketiga, merupakan ideologi terandaikan merupakan cerminan yang masuk ke dalam diri namun mengalami disintegrasi, limitasi atau kontrol yang lahir dari gagasan ideologi tersebut. Berdasarkan landasan serta gagasan konstruktif dari Žižek mengenai kritik ideologi menjadi kerangka untuk melihat bagaimana agama sebagai fantasi ideologi dalam menertibkan kehidupan publik dan menjadi instrumen elit mengontrol salah-benar tindakan masyarakat. Pemikiran dari Žižek lahir atas pembacaannya terhadap Hegel, Karl

Marx dan Jaques Lacan. Ia mengambil konsep dialektika dari Hegel dan mengembangkan kekritisannya dari Marx untuk melihat strata sosial kemudian dikombinasikannya dengan gagasan Lacan mengenai metode psikoanalisis.

Bagi Marx, agama adalah media masyarakat mengekspresikan mimpinya tentang sebuah dunia yang berbeda dan lebih baik (Goldstein, 2006). Lebih lanjut, bagi Marx agama merupakan hasrat dan desahan makhluk yang tertindas ekspresi pekat dari hati terdalam dan kondisi apatis jiwa atas kehampaan jiwa (Marx, 1977). Objek dari kritikan Marx bukanlah desahan (walaupun ini adalah produk dari situasi), hati atau roh, melalui konsep kiri Hegelian, Marx mengkritisi pengertian abstraksi mengenai agama *an sich* (pada dirinya sendiri) juga mengkritik negara dan masyarakat sebab bergantung pada agama (Mckinnon, 2006). Bagi Marx agama harus menjadi *aufheben* (membatalkan) jika dalam bahasa Inggris *towards a critique* (menuju kritik) (Schmidt, 2020). Kritik Marx mengenai agama sederhananya mengkritisi kaum kapital yang memakai lembaga agama untuk menertibkan kehidupan publik melalui wacananya. Mendasari secara teoritis gagasan Marx mengenai agama dapat dilihat melalui catatan historisnya tentang perkembangan revolusi industri yang terjadi pada konteks Eropa abad 1760-1850 (Marx & Engels, 1988). Agama dalam hal ini dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan para pemegang modal sehingga melahirkan diskursus kapitalisme.

Kerangka teoritis ini dijadikan media dalam meneropong secara dialektis bagaimana relasi antara agama dan budaya dalam konteks Minahasa. Kepastian fundamental bahwa agama telah menjadi media yang mengontrol kehidupan masyarakat Minahasa dan mengambil alih kesadaran kolektif sehingga perlu untuk dikritik. Agama pada konteks Minahasa dijadikan ideologi sekaligus instrumen elit mengontrol kehidupan publik dan menjadi media para penguasa mewacanakan *episteme* (pengetahuan) dalam melanggengkan kekuasaannya. Kuat ditransmisikan melalui pengajaran dalam pendidikan kristiani, agama telah menjadi narasi dalam fantasi ideologis sehingga membentuk kebenaran tunggal. Selain itu, agama dan struktur dalam konteks Minahasa telah menjadi satu entitas yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya, instrumen yang dipakai adalah kritik ideologi dari Zizek dan kritik agama berdasarkan gagasan Marx dalam melihat bagaimana imajinasi-ideologi kolonialisme yaitu agama masih langgeng di Minahasa sehingga cenderung meminggirkan narasi-narasi kearifan lokal. Peminggiran ditandai dengan kuasa dari para tokoh agamawan yang mengambil alih secara dogmatis tindakan masyarakat lewat limitasi gerak sosio-religi.

Relevansi penggunaan konsep teoritis dari Zizek dalam mengkritik ideologi pada tubuh struktural kekuasaan Minahasa menjadi landasan penggunaan teori tersebut. Dalam konteks Minahasa langgeng ideologi kolonialisme yang menjadi imajinasi atau hasrat sehingga terus-menerus diproduksi menjadi pengetahuan bagi pihak penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Melihat model kekuasaan yang dipraktikkan oleh para penguasa dalam konteks Minahasa menjadikan agama sebagai ideologi sekaligus instrumen elit mengontrol kehidupan publik merepresentasikan kekuasaan banal sebab mengesampingkan nilai-nilai narasi lokal. Karena itu, perlu untuk mengkritiknya secara metodologis dan teoritis melalui konsep kritik ideologi dari Zizek sehingga penelitian ini dianggap absah dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan bagi perkembangan dunia akademik. Sedangkan narasi kritik agama menurut Marx menjembatani kritik ideologi dari Zizek terhadap praktik-praktik imajinasi kolonialisme yang masih ditransmisikan sampai sekarang di Minahasa.

Pembahasan

Kritik Agama dalam Konteks Minahasa

Selama ini, agama dalam konteks Minahasa telah menjadi entitas yang berkuasa dalam menentukan kebijakan serta tindakan salah-benar kehidupan masyarakat termasuk mengontrol ruang-ruang publik. Perjumpaan antara kekristenan dan kepercayaan lokal di Minahasa memiliki perbedaan mendasar. Kekristenan berpusat pada kitab suci sedangkan kepercayaan lokal berbasis pada tradisi lisan atau *numu' i tua* (pesan orang tua). Walau demikian, didominasi oleh kekristenan lewat pendidikan para *zendeling* (misionaris). Dominasi kekristenan telah menciptakan kultur nepotisme dan politik imperialisme dengan pendasaran legitimasi serta hegemoni terhadap pola gerak sosial masyarakat. Prolegomena historis relasi antara kekristenan serta budaya Minahasa sampai kontemporer belum menemukan titik temu dan sering bertikai satu dengan yang lain. Pertikaian yang terjadi dalam ruang-ruang publik seperti, mengunjungi situs-situs sakral yaitu, *watu pinawetengan* (batu tempat pembagian) *waruga* (makam kuno orang Minahasa) dianggap menyimpang dari ajaran kekristenan. Stigmatisasi ini yang membuat masyarakat berbasis tradisi sering mengalami kecaman negatif dan berperilaku alifuru.

Meminjam pendapat dari Pinontoan yang menjelaskan proses rekonstruksi kearifan lokal Minahasa telah mengalami perubahan oleh kepercayaan Kristen ditandai dengan hak atau kebijakan memilah dan memilih narasi kultural positif serta negatif dalam mendukung pertumbuhan injil di Minahasa (Pinontoan, 2015). Pemilihan ini menandakan *super-power* dari agama Kristen telah mengambil alih kebijakan publik termasuk mengontrol diskursus melalui relasi kuasa. Semenjak kekristenan masuk dan berkembang di tanah Minahasa banyak terjadi perubahan sosial, kebudayaan maupun religi, yang memengaruhi pola pikir masyarakat dari mitos ke *logos* (sabda/pengetahuan). Menurut Bertha Pantow, melalui penelitiannya tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam konteks Minahasa merupakan pengaruh dari para *zendeling* yang datang memperkenalkan corak Kristen Pietis (Pantow, 1994). Pada dasarnya pengajaran Kristen Pietis merupakan gejala atau diskursus yang berkembang dalam konteks Eropa semenjak abad pencerahan ditandai dengan reformasi oleh Marthin Luther. Pietisme lahir dari corak rasionalitas abad pencerahan yang menekankan kehidupan bermoral, beretika patuh terhadap norma-norma serta mengikuti jalan-jalan kebenaran tunggal kitab suci agam Kristen. Selain itu, kemunculan dari Kristen Protestan bermula dari kritik Martin Luther terhadap penyalahgunaan ajaran yang dilakukan oleh elit agawaman. Sedangkan Kristen Pietis merupakan gerakan komunitas yang taat terhadap nilai-nilai agamis berdasarkan ajaran kekristenan.

Kemunculan Pietisme merupakan cara manusia patuh terhadap nilai-nilai kebenaran agama melalui kitab sucinya yaitu kekristenan. Awal mula gerakan ini muncul dari buah pemikiran Lutheranisme yang berlangsung pada abad 17-18, dengan penekanan kesalehan formalitas sehingga tidak terjadi penyimpangan (Collins, 2006). Paham Pietisme tersebut dikemudian hari dibawa oleh para *zendeling* lewat lembaga NZG ke-Indonesia khususnya Minahasa berkembang pesat melalui lembaga agama Kristen yaitu, Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Menjadi gereja mandiri GMIM berdiri pada tahun 1934 dan memilih mengembangkan sendiri struktural serta fungsional lembaga terlepas dari bantuan Belanda. Keunikannya GMIM merupakan gereja yang lahir dari rahim *zendeling* Belanda ditandai dengan corak Calvinisme lewat buah-buah Kristen Pietis berbasis pada gaya rasionalitas. Jadi, agama

dalam konteks Minahasa merupakan khas gaya berpikir Barat yang masih menjadikan wilayah bekas jajahan sebagai objek.

Pola Kristen Pietisme yang berkembang di Minahasa menolak pendekatan-pendekatan interdisiplineritas ilmu dalam menggabungkan diskursus sosial dengan teologi karena dianggap terlalu liberal. Pendekatan teologi dalam perspektif agama pada konteks intelektual Minahasa menolak diskursus plural dan lebih memilih pengetahuan tunggal yang menjadikannya fundamental serta eksklusif. Penolakan terhadap diskursus *logos* diluar teologi Kristen menjadikan para teolog-teolog muda Minahasa mengalami stigmatisasi negatif atau sinkretis. Padahal diskusi mengenai *logos spermaticos* (benih pengetahuan/sabda) tidak hanya terbatas bekerja pada teks formal saja melainkan dapat lahir melalui pergumulan masyarakat atas nama adat (Lattu, 2020). Stigmatisasi sinkretis terhadap masyarakat yang masih mempraktikkan tradisi-tradisi Keminahasa telah mengalami kekerasan identitas oleh suprastruktur yaitu kekristenan. Menolak *logos* yang berbasis pada pengetahuan masyarakat dalam diskursus kearifan lokal Minahasa mengingkari nilai-nilai agama Kristen sebagai representasi agama humanis, penuh kasih. Agama Kristen bukanlah narasi kekerasan namun telah digaungkan oleh para pemangku kebijakan yang terganggu oleh narasi-narasi dari pinggir sebab menolak gaya kepemimpinan imperial.

Gaya kepemimpinan politik imperial dalam konteks Minahasa ditandai dengan kehadiran para *white collar* yang berkuasa melalui suara kenabiannya untuk mengontrol gerak spiritual masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap narasi teologis telah menjadikan teologi sebagai instrumen para elit menertibkan tubuh sosial masyarakat dan mengambil alih produksi pengetahuan. Politik imperial merupakan diskursus atau transmisi yang dilakukan oleh pihak kolonial melalui pendidikannya sehingga masih dipraktikkan lewat lembaga agama yaitu GMIM. Politik imperial ditandai dengan kepatuhan terhadap satu suara menolak diskursus diluar dari teks formal serta menjanjikan wacana adat untuk melanggengkan kekuasaannya. Karena itu, agama telah menjadi candu bagi para elit Minahasa karena efektif dalam mengontrol kehidupan masyarakat untuk patuh. Kekerasan atas nama agama menjadi wacana menakutkan bagi narasi pinggir seperti pengetahuan masyarakat yang berbasis kearifan lokal (Mawuntu, 2020). Mengatasmakan agama sebagai narasi *super-power* dalam menormalisasikan kehidupan masyarakat merupakan kekerasan struktural yang bertujuan untuk mendominasi produksi-produksi pengetahuan. Pada dasarnya agama bukanlah media untuk melakukan peminggiran narasi atau kekerasan melainkan instrumen perdamaian yang merangkul perbedaan.

Kekerasan yang dilakukan atas nama agama dalam konteks Minahasa merupakan gagasan yang lahir dari hasrat superior dari para penguasa. Kelompok elit merasa berkuasa menertibkan publik melalui kebijakannya tanpa memikirkan hak-hak kebebasan berekspresi dari kelompok lain. Narasi atas nama elit melakukan peminggiran terhadap nilai-nilai kultural karena dianggap rendah atau masih berbau mitos, tidak masuk akal sehingga perlu untuk ditinggalkan. Karena itu, kekerasan yang dilakukan atas nama agama wajar dilakukan sebab telah mendaging menjadi kebenaran tunggal dalam menolak diskursus diluar kepercayaan Kristen. Mereka yang berusaha mengkristenkan teks-teks kultural adalah bagian dari kekerasan bermotif agama. Muttaqin dalam Marx menjelaskan bahwa agama tidak menjadi solusi dalam membantu masyarakat keluar dari penindasan tetapi justru meneguhkannya (Muttaqin, 1970). Kesadaran palsu yang lahir dari agama dijadikan oleh elit sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaannya dan terus-

menerus menawarkan kecanduan-kecanduan palsu. Dalam hal ini, agama justru meneguhkan *status quo* (proses keberlangsungan) dari penguasa untuk mengkristalkan kekuasaannya.

Kritik agama dari perspektif Marx lahir dari gagasan Feurbach tentang agama sebagai proyeksi manusia yang berbasis pada kritik Hegel mengenai roh absolut. Menurut Feurbach, roh absolut dari Hegel adalah representasi dari Tuhan orang Kristen atau diskursus teologi. Ia berfokus pada nilai kemanusiaan manusia yang telah tergantikan dengan Tuhan sebagai narasi utama dalam agama (Feurbach, 1967). Karena itu, ia mengkritik Hegel yang mengabsolutkan diskursus keilahian dalam filsafat idealisnya. Senada dengan Marx yang mengkritik agama, jalur kritik Feurbach kemudian dianyam kembali oleh Marx dengan gagasan bahwa Feurbach belum melihat mengapa manusia membutuhkan agama dalam kehidupannya. Pendasaran inilah yang menjadi kritik radikal Marx mengenai agama dalam relasinya dengan masyarakat (Valerian, 2021). Dalam perdebatan tersebut, Marx melihat bahwa perlu untuk melihat hal-hal realitas bagaimana agama memengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat lewat struktur-struktur yang menindas (Hadirman, 2009). Hal ini yang membuat Marx beranggapan bahwa masyarakat memiliki pelarian primer yaitu, agama untuk melegahkan batin dan menghindari penderitaannya. Pendasaran tersebut, menjadikan agama sebagai diskursus yang perlu untuk dikritik sebab telah menjadi instrumen para pemangku kebijakan mengontrol kehidupan sosio-religi masyarakat.

Kritik agama dalam konteks Minahasa bermuara dari kekerasan struktural yang dilakukan oleh para elit dalam mengatasnamakan agama sebagai kebenaran tunggal. Agama telah mengambil alih wacana-wacana kebebasan berekspresi dari masyarakat untuk memproduksi pengetahuan kultural. Contoh kasus mengenai wacana adat tentang pengucapan syukur atau ritus *rumages* (persembahan) orang Minahasa yang diselenggarakan oleh berbagai etnis dan telah ditetapkan oleh para leluhur tidak boleh diseragamkan sebab setiap etnis memiliki ciri khasnya. Oleh tokoh agamawan bersepakat dengan para politikus untuk menertibkan wacana adat ini menjadi seragam dirayakan bersama-sama. Hal ini kemudian menjadikan agama dan negara dalam konteks Minahasa tidak mengalami sekularisasi sebab sering tampil menentukan kebijakan-kebijakan publik. Proses desekularisasi merupakan penyatuan antara agama dan negara di ruang-ruang publik untuk mewacanakan kuasa sehingga terjadi dinamika yang melanggengkan kekuasaan (Weigel & Grace, 1999). Penyatuan antara agama-negara dalam konteks Minahasa telah menjadikan kekristenan khususnya lembaga GMIM sebagai gereja negara yang sering tampil bersama dengan para politikus di ruang-ruang publik.

Secara historis, agama khususnya kekristenan dalam konteks Minahasa merupakan benih-benih yang dibawa oleh kolonial seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kekristenan dalam konteks Minahasa adalah agama negara yang dibawa oleh bangsa Eropa khususnya Belanda melalui lembaga *Indische Kerk* (Gereja Hindia) dibentuk oleh *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) pada tahun 1602-1800 (Pinontoan, 2019b). Menjadi gereja negara, GMIM memang pada dasarnya telah diasuh oleh pihak kolonial Belanda yang meniru gaya kepemimpinan para kolonial, tradisi politik dan gaya berkuasa. Jadi, secara historis GMIM telah berdiri bersama-sama dengan corak politik-birokratis yang menjadikannya bertahan sebagai gereja *super-power* di Minahasa. Karena itu, kecanduan beragama dalam konteks Minahasa terjadi secara kontinu semenjak masuknya agama Kristen di tanah Minahasa yang dibawa oleh kolonialisme Belanda. Pihak kolonial telah membawa suatu struktur sosial utama atau kelakuan psikologis yang membentuk perilaku beragama berdasarkan dogmatis atau narasi dengan fokus utama kebenaran tunggal.

Corak agamis dalam konteks Minahasa telah menjadikan masyarakat mencari *value* (nilai) dari sebuah kebenaran dan tujuan hidup yang mengubahnya mematuhi peraturan-peraturan atas nama agama. Kehidupan religius masyarakat Minahasa menjadikan agama sebagai lembaga yang memiliki dimensi kuasa untuk mengatur ketertiban masyarakat. Karena itu, para kaum agamawan menjadikan agama sebagai alat yang melegitimasi salah-benar tindakan kehidupan sosio-religi masyarakat Minahasa. Maka, dapat dikatakan masyarakat Minahasa pada umumnya berada dalam cengkraman kuasa para kaum agamawan sehingga tindakan formal-informal masyarakat dikontrol oleh lembaga yang bernama agama. Pada dasarnya, lembaga seperti gereja yang terdiri dari kuasa sinodal, wilayah berada dalam kontrol oleh kaum agamawan melalui sosialisasi, intersubjektivitas, normalisasi dan legitimasi. Tujuan dari penertiban tersebut menjadi dasar bahwa agama sangat efektif dalam mengontrol kehidupan masyarakat lewat normalisasi.

Pembiasaan dari kaum agamawan menjadikan masyarakat Minahasa tunduk pada struktur kekuasaan dan enggan untuk berbicara karena telah dihegemoni. Sifat tunduk dari masyarakat Minahasa terhadap struktur kekuasaan menjadikan masyarakat apatis terhadap keadaan dan lebih memilih untuk mengikuti arus serta menaruh kepercayaan sepenuhnya pada pihak penguasa. Menurut Fritz Solmitz sifat apatis lahir dari sikap ketidakpedulian individu terhadap fenomena sosial yang terjadi, karena merasa tidak berhak dan kurang peminatan khusus untuk terlibat langsung pada aspek-aspek emosional (Rothfels, 1970). Bagi masyarakat Minahasa pada penguasa memiliki kewenangan terhadap aspek-aspek kehidupan sosial sehingga masyarakat lebih memilih membiarkan pihak penguasa mengambil alih setiap dimensi kehidupan masyarakat. Berdasarkan sifat apatis dari masyarakat Minahasa, pihak penguasa diberi ruang oleh masyarakat sehingga para elit agamawan mengontrol dan melegitimasi salah-benar tindakan masyarakat. Karenanya tercipta ruang atau panggung yang dikuasai oleh elit seperti, pertunjukan satu orang (*one man show*). Maka, dapat dikatakan kekuasaan elitis menjadikan masyarakat Minahasa tunduk terhadap suara kekuasaan.

Relasi antara negara struktur kekuasaan dan agama dalam konteks Minahasa memiliki kedekatan emosional-politis. Semenjak kolonialisme menguasai sektor sosio-politis, agama dan negara mulai bertemu untuk menentukan kebijakan bersama. Karenanya, konteks Minahasa agama dan negara menjadi *bio-power* yang menentukan sistem kehidupan masyarakat sekaligus memegang terjadinya keadilan. Berkelindannya agama dan negara dalam menentukan kebijakan mengakibatkan desekularisasi sebab agama bersama negara kompak tampil di ruang-ruang publik. Walau demikian, kritik terhadap agama adalah kontribusi untuk mengungkap persembunyian para elit yang beraktifitas melanggengkan kekuasaannya lewat lembaga agama. Eksposisi di atas menegaskan bahwa agama bukanlah narasi kekerasan namun dipakai oleh para penguasa untuk melegalkan kekerasan sehingga dianggap absah dalam meminggirkan narasi-narasi kultrual konteks Minahasa, maka perlu dikritik secara teoritis dan metodologis.

Upaya Pelanggengan Kekuasaan dan Kritik Ideologi-Imajinasi Kolonialisme

Pola pikir masyarakat Minahasa merupakan benih-benih yang lahir dari corak berpikir pendidikan kristiani oleh kolonialisme. Melalui sistem pendidikan seperti melatih masyarakat menjadi guru jemaat, Belanda berhasil mengubah struktur *episteme* Minahasa dari mitos ke *logos*. Wacana atas nama kolonialisme seringkali dikumandangkan lewat cara kepemimpinan yang menekankan kepatuhan atau politik imperialisme. Kekuasaan dalam konteks Minahasa

mengambil alih hampir setiap aspek sosial masyarakat mulai dari intelektual, ide, imajinasi, kebebasan, kepercayaan, pengetahuan. Kontrol ini merupakan gaya politik kolonial yang memlimitasi gerak intelektual-spiritual masyarakat berada dalam wilayah kekuasaan penguasa. Selain itu, pada masa Orde Baru (Orba) masyarakat Minahasa pernah mengalami pengekan dalam memproduksi pengetahuan kultural, ditandai dengan narasi Jawanisasi oleh rezim Orba. Hal ini yang menjadi dasar bahwa imajinasi kolonialisme masih langgeng dengan bukti realitas gaya kepemimpinan lembaga agama dan para politikus di Minahasa. Wacana imajinasi kolonialisme yang langgeng di Minahasa menolak kekritisn masyarakat dalam menilai gaya kepemimpinan para penguasa dan melakukan aktivitas kekerasan struktural lewat peminggiran narasi.

Ideologi elit dalam konteks Minahasa bermuara pada narasi dari dalam diri yaitu, kepercayaan, ide, hasrat dan tujuan atau nilai yang ditanamkan melalui pendidikan. Kepercayaan merupakan konsepsi yang lahir dari dalam diri oleh Zizek menyebutnya sebaga *in-itself* sehingga perlu untuk dikritik karena mengganggu kebebasan dialektis manusia sebagai subjek pemegang *freedom* (kebebasan). Bagi Zizek, perlu untuk melihat ideologi secara dialektis dan tidak serta merta membiarkannya menjadi diskursus yang sulit untuk ditelusuri (Zizek, 1989). Lebih lanjut, Zizek mengklasifikasikan ideologi yang lahir dari dalam diri sebagai pembentuk kepatuhan normatif. Selain itu, ideologi adalah pembentuk realitas yang ditawarkan secara konstruktif untuk menutupi *the real* (yang nyata) lewat realitas itu sendiri (Wattimena, 2011). Menerima ideologi yang lahir dari dalam diri sebagai realitas merupakan kenyataan atau jalan alternatif pelarian dari *the real* traumatik. Karena itu, kritik terhadap ideologi selalu bersifat terbuka.

Fokus Zizek pada ideologi kapitalisme global yang telah menjadi kultur menakutkan bagi masyarakat sehingga tunduk begitu saja tanpa bersifat kritis. Dominasi kapitalisme global telah merajalela dan berusaha menciptakan tatanan-tatanan struktur baru dalam mengontrol kehidupan masyarakat. Pada sisi lain, subjek diberi sensasi untuk menikmati kultur baru yang telah diciptakan oleh para kapitalisme global dengan bebas, nyatanya semua struktur-struktur baru terdapat suprastruktur dalam mengontrol kebebasan subjek. Situasi ini oleh Zizek menyebutnya sebagai kepatuhan subjek terhadap kenikmatan dipaksa serta diwajibkan menikmatinya dengan sadar, demikian terjadinya kebangkitan superego (Zizek, 1997). Jika ditelusuri dalam konteks Minahasa agama sebagai kepercayaan oleh para elit telah menjadikannya alat yang mengontrol kesadaran subjek dengan tujuan melanggengkan kekuasaanya. Agama khususnya kekristenan yang dibawa oleh kolonial telah menjadi narasi ideologis dan merepresentasikan fantasi kenikmatan sehingga membentuk ideologi kebenaran bagi masyarakat Minahasa. Kemudian ternikmati oleh subjek dalam inkonsistensi tatanan simbolis.

Sebagai ideologi elit dalam melanggengkan kekuasaannya, agama berkali-kali dijadikan instrumen praktik politik imperialisme yang bermuara pada narasi oligarki. Melalui gagasan Zizek tentang kritik ideologi dalam menetralkan elit yang cenderung mengkristal, perlu untuk menelusuri imajinasi-ideologi kolonialisme seperti agama, praktik politik imperialisme dan narasi suprastruktur. Langgengnya imajinasi kolonialisme menjadikan tubuh sosial masyarakat Minahasa patuh secara hegemonik. Kebenaran tunggal yang dilahirkan atas nama imajinasi-ideologi kolonialisme secara terang-terangan memutuskan bahwa diskursus-diskursus di ruang publik bersifat tunggal. Masyarakat Minahasa berada dalam ketidaksadaran akan hegemoni kultural yang dilakukan oleh penguasa. Imajinasi kolonialisme telah melahirkan kultur hegemonik yang

dilanggengkan lewat wacana-wacana pemegang kekuasaan. Kenyataan ini ditandai dengan narasi hegemoni kultural seperti pembiasaan atau normalisasi kehidupan sosial masyarakat.

Hegemoni kultural menjadikan tindakan dan keseharian masyarakat Minahasa berada dalam normalisasi sebagai representasi dari bentuk strategi intersubjektivitas penguasa melanggengkan kuasa. Antonio Gramsci mengemukakan gagasan revolutif bagaimana membongkar hegemoni kekuasaan yang telah mengkristal dan menghegemoni kehidupan masyarakat melalui revolusi radikal terhadap struktur hegemoni. (Morton, 2007). Membongkar hegemoni artinya melakukan pembatalan terhadap metanarasi kapital yang terbangun dalam konteks masyarakat tertentu. Karena itu, hegemoni dalam konteks Minahasa perlu untuk dibatalkan karena terkesan mengesampingkan nilai-nilai kultural Keminahasa. Penegasan mengenai budaya hegemonik yang dilakukan oleh para elit lewat media agama telah menjadikan narasi agama sebagai ideologi sekaligus fantasi kenikmatan bagi pencari ketenangan semu. Agama sebagai ideologi dipakai oleh para elit menjadi pengawas atau panoptikon ilahi yang mengontrol gerak agamis masyarakat Minahasa.

Sebelumnya sistem penjagaan panoptik telah digagas oleh Jeremy Bentham, bagi Bentham sistem panoptikon bukan hanya seperti yang dipikirkan Michel Foucault, 'sangkar yang kejam dan licik', di mana subjek berkolaborasi dalam penaklukan mereka sendiri tetapi lebih dari itu. Menurut Bentham, sistem panoptik sebagai modus baru dalam memperoleh kekuatan dari pikiran untuk pikiran, konsep desain dari Bentham menjelaskan pengamat untuk mengamati (*opticon*) semua penghuni lembaga tanpa mereka sadari apakah mereka sedang diawasi atau tidak (Bentham, 1995). Sistem panoptikon dipasang dalam konsep arsitektur seperti, rumah sakit, sekolah atau asrama sehingga subjek yang diawasi patuh terhadap pemegang kuasa.

Tindakan pengontrol ini kemudian menimbulkan kepatuhan dan ketakutan kepada sistem dalam diskursus mengontrol dan yang dikontrol (Eldija, 2016). Dari panoptik arsitektur ke panoptikon ilahi, kaum *white collar* menjadi pengawas psikologi arsitektur manusia yaitu, tubuh dan jiwa. Secara filosofis, perkembangan *white collar* sebagai pengawas tindakan keseharian masyarakat menjadikan relasi sehari-hari terkerangkeng ketakutan berpikir dengan bebas dan bertindak bebas. Lembaga agama oleh *white collar* dijadikan panoptikon ilahi yang mengontrol masyarakat Minahasa berada dalam kepatuhan pada pemangku kebijakan. Karena agama telah menjadi ideologi dan alat yang mengontrol kehidupan masyarakat kebebasan masyarakatpun dipertanyakan di ruang-ruang publik. Meminjam pendapat dari Gustavo Gutierrez, kebebasan tidak memihak pada kaum kaya atau miskin begitu juga sebaliknya tidak memihak pada kelompok berintelektual dan non-intelektual justru pembebasan adalah hak lahiriah sebab sudah menjadi martabat sejak lahir (Gutierrez, 1973). Berbeda dengan Gutierrez, penelitian ini menggagas emansipasi berdimensi intelektual-spiritual dan ideologi imajinasi kolonialisme yang masih langgeng di Minahasa.

Sebab dari langgengnya imajinasi serta ideologi kolonialisme dalam tubuh masyarakat Minahasa dimensi pembebasan menjanjikan kebebasan berekspresi dalam ruang-ruang publik termasuk memproduksi pengetahuan berbasis kultural. Melalui kebebasan substantif, setara atau adil masyarakat Minahasa menuju pembebasan ruang-ruang produksi pengetahuan tanpa intimidasi serta hegemoni dari pihak penguasa. Hal ini kemudian menjadi narasi yang terus-menerus diperjuangkan oleh masyarakat adat lewat narasi-narasi kultural. Gerakan kritik ideologi kolonialisme dalam konteks Minahasa selama ini masih berada dalam ranah praksis belum

dikumandangkan lewat narasi-narasi teoritis serta metodologis berupa tulisan, artikel atau penelitian secara terbuka. Karena itu, perlu untuk mengkritik imajinasi-ideologi kolonialisme ditandai dengan agama khususnya kekristenan serta praktik-praktik politik imperialisme dan demokrasi terstruktur yang mengkerangkeng kebebasan masyarakat Minahasa berekspresi di ruang-ruang publik.

Meminjam pendapat dari Jurgen Habermas yang ahli dalam bidang kritisisme teori sosial, menjelaskan ruang publik atau *public sphere* adalah ranah kehidupan sosial dalam bentuk ruang, arena dan tempat untuk mencapai kepentingan publik sebagai jalan primer sehingga mencapai sistem demokratis yang humanis (Habermas, 1991). Lebih lanjut, ruang publik disediakan dalam demokrasi deliberatif di luar kekuasaan dan dominasi elit, Habermas mengharapkan struktur perlu menyediakan ruang-ruang sekaligus menjadi mediator jaringan-jaringan komunikasi publik kepada masyarakat sipil, bebas mengedepankan argumen-argumen termasuk kebebasan memproduksi pengetahuan (Habermas, 1994). Kebebasan berekspresi dan memproduksi pengetahuan dalam ruang publik menjadikan masyarakat Minahasa mendapatkan kesetaraan yang adil atau *fair* (adil). Menurut John Rawls yang ahli dalam teori keadilan, mengemukakan konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai keadilan) menjelaskan *liberty* (kebebasan) dan *equality* (kesetaraan) dapat dipadukan sebagai entitas dengan basis keadilan seperti, setiap orang memiliki kebebasan asasi dan hak yang sama (Rawls, 2001).

Walau demikian, melalui kontrol psikologi arsitektur dari pihak elit Minahasa menjadikan pengawasan terhadap kognitif maupun gerakan masyarakat adat terkerangkeng. Hal ini kemudian mendorong penelitian ini untuk memikirkan kembali struktural dalam konsep teoritis *rethinking-post-structure* (kembali memikirkan mazhab struktur) dengan gagasan *rethinking-structure* (kembali memikirkan struktur). *Post-structure* (sesudah struktural) merupakan gagasan yang lahir dari ketidaksetujuan terhadap dalil struktural sebab melahirkan narasi tunggal dan membenaran absolut (Bruce, 2006). Berbeda dengan *rethinking-structure* penelitian ini bertujuan bukan meninggalkan gagasan *post-structure* melainkan mengembangkan gagasan tersebut pada ranah konteks Minahasa sebab masyarakat Minahasa telah terjebak dalam dinamika struktur yang diskriminatif terhadap narasi pinggir. Karenanya perlu untuk memikirkan kembali struktur dengan cara-cara memberi penghargaan terhadap narasi-narasi yang terpinggirkan karena dominasi elit sehingga mencapai equilibrium sosial. Ada tiga bentuk untuk mencapai equilibrium sosial dalam konteks Minahasa pertama, keadilan, kesetaraan dan penghargaan.

Selama ini, dialektika elit dan masyarakat pinggir belum menemukan titik temu, pertikaian tersebut lahir karena memperebutkan ruang sosio-politik. Karenanya dalam konteks Minahasa jauh dari konsep equilibrium sosial sehingga sering terjadi konflik eksistensial antar kelompok elit dan masyarakat adat. Berdasarkan dialektika antara elit dan masyarakat adat perlu adanya metode pendekatan humanistik dengan tahapan keadilan, kesetaraan serta penghargaan. Tahapan keadilan memberi kebebasan substantif kepada masyarakat adat ketika melakukan produksi pengetahuan dan berekspresi berdasarkan identitas kultural Keminahasa serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan asasi. Kemudian kesetaraan, pihak elit perlu untuk menanamkan prinsip-prinsip kultural berbasis Keminahasa seperti prinsip para petuah *masuat mapute waya* (sama-sama memiliki hak setara dalam berekspresi). Selanjutnya penghargaan, seperti eksposisi di atas ketika terjadi perjumpaan antara budaya kolonial dan Minahasa terjadi peminggiran narasi sebab kolonial mendominasi budaya Minahasa melalui pendidikan. Karenanya penghargaan

terhadap narasi-narasi kearifan lokal di Minahasa adalah bagian elit kekinian menerima narasi lokal dalam konteks Minahasa sehingga tidak terjadi bias diskursus.

Kesimpulan

Minahasa memang merupakan bekas wilayah kolonisasi dari Belanda. Walau demikian, pertahanan yang dilakukan oleh para subjek sebagai representasi dari figur-figur pembentuk ruang publik dalam konteks Minahasa telah mengalami proses dialektis dan kritis terhadap kebijakan elit. Pada dasarnya, agama dalam konteks Minahasa dilanggengkan oleh para elit untuk menertibkan masyarakat lewat wacana-wacana teologis. Karena itu, agama dalam konteks Minahasa dijadikan ideologi sekaligus instrumen elit mengambil alih kehidupan publik dan mengontrol salah-benar tindakan masyarakat. Argumentasi yang lahir dalam mengkritik narasi imajinasi-ideologi kolonialisme ditandai dengan perdebatan antara agama khususnya kekristenan dan budaya Minahasa belum menemukan titik temu. Seringkali agama menjadi tesis sedangkan budaya sebagai antitesis begitu juga sebaliknya budaya menjadi tesis dan agama menjadi antitesis. Pertikaian ini ditandai dengan ideologi kebenaran tunggal yang lahir melalui narasi agama sebab konstruktif mengubah diskursus kebudayaan Minahasa jika bertentangan dengan proses penginjilan.

Kritik terhadap imajinasi-ideologi kolonialisme seperti agama yang melahirkan imajinasi kepercayaan tunggal berbasis pada narasi kitab suci telah menolak kepercayaan diluar kebenaran Kristen. Karenanya masyarakat Minahasa telah mengalami disubordinasi oleh para elit berdasarkan praktik politik imperialisme dan nepotisme yang kemudian bertendensi mengabaikan narasi-narasi dari pinggir seperti kearifan lokal. Gagasan kritis dari Zizek menjadi instrumen penelitian ini untuk melihat bagaimana ideologi kolonialisme yang masih langgeng pada tubuh struktural Minahasa cenderung menjadi meta-narasi. Disamping itu, kritik agama berdasarkan perspektif Marx menjadi pisau analisis yang membongkar narasi-narasi penyimpangan oleh para elit dalam menertibkan sosio-kultural masyarakat. Marx menekankan gagasan konstruktif bahwa agama perlu untuk dikritik sebab menjadi instrumen elit melanggengkan kekuasaannya. Hal tersebut, terjadi dalam konteks Minahasa sebagaimana para elit menggunakan agama sebagai instrumennya untuk mewacanakan terus menerus kekuasaannya sehingga terjadi kristalisasi kekuasaan.

Secara konstruktif, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemikiran kritis dalam ruang-ruang akademis dan masyarakat awam untuk lebih terbuka terhadap kenyataan palsu yang diciptakan oleh para penguasa sebagai jalan alternatif menertibkan kehidupan masyarakat. Lewat ideologi, para elit mengambil alih kesadaran masyarakat untuk patuh kepada struktur-struktur yang pada dasarnya adalah kepalsuan buatan elit. Menjadi narasi yang mendasari kritik terhadap pola imajinasi kolonialisme sebab langgeng di Minahasa, secara teoritis Zizek memberikan gagasan kritis dalam menjungkirbalikkan kekerasan struktural. Melalui tatanan simbolis narasi-narasi atas nama kearifan lokal Minahasa terus-menerus menjadi diskursus yang melawan kejahatan struktural sehingga dengan bebas mengesampingkan diskursus Keminahasaan. Tindakan ini menjadi perspektif kebebasan yang dilandasi berdasarkan situasi problematik untuk terus-menerus kritis terhadap kekuasaan. Karena itu, penelitian ini merupakan langkah independen dalam menarasikan kebebasan berpendapat tanpa intervensi penguasa.

Saran dalam penelitian selanjutnya dapat mengemukakan perspektif gerakan-gerakan sosial-kultural dalam konteks Minahasa yang secara masif memperjuangkan hak-hak kesetaraan untuk memproduksi pengetahuan kultural tanpa intervensi kekuasaan. Menjadi titik tolak dalam artikel ini untuk membuka kembali narasi-narasi kultural Minahasa sehingga boleh dieksplorasi secara metodologis serta mendasar bagi kepentingan penelitian selanjutnya. Walaupun kuat menjadi masalah yang diperdebatkan dalam ruang-ruang publik, penelitian ini mengembangkan narasi dialektis antara relasi agama dan budaya dalam konteks Minahasa sebab sering bertikai memperebutkan ruang. Karena itu, penelitian ini berfokus pada diskursus kritik terhadap praktik imajinasi kolonialisme dalam konteks Minahasa sebab masih langgeng.

Referensi

- Bentham, J. (1995). *The Panopticon Writings* (M. Bozovic (ed.)). Verso.
- Berger, P & Luckmann, T. (2016). The social construction of reality. *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives: Second Edition*, 110–122. <https://doi.org/10.4324/9781315775357>
- Bruce, S. and S. Y. (2006). *The Sage Dictionary of Sociology*. Sage Publications Ltd.
- Collins, M. & M. A. P. (2006). *Milenium The Story of Christianity: Menelusuri Jejak Kristianitas*. Kanasius.
- Creswell, W. J. (2009). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication, Inc.
- Eldija, F. D. and F. M. (2016). "Panoptic Architecture. *Media Matrasain*, 13(1).
- Fadjar Ibnu Thufail dan Martin Ramstedt. (2011). *Kegalaan Identitas: Agama, Entitas, dan Kewarganegaraan Pada Masa Pasca-Orde Baru*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ferretter, L. (2006). *Routledge Critical Thinkers: Louis Althusser*. Routledge.
- Feurbach, L. (1967). *Lectures on the Essence of Religion*. Harper and Row.
- Goldstein, W. S. (2006). *Marx, Critical Theory, And Religion: A Critique of Rational Choice*. Brill Academic Publishers.
- Gutierrez, G. (1973). *A Theology of Liberation*. Marykonoll, Orbits Books.
- Hadirman, B. F. (2009). *Kritik Ideology: Menyingkap Pertautan dan Kepentingan Bersama Jurgen Hubermas*. Kanasius.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (T. Burger (ed.)). Cambridge: The MIT Press.
- _____, J. (1994). *Justification and Application: Remarks in Discourse Ethics* (C. Cronin (ed.)). Cambridge: The MIT Press.
- Kimbal, A. (2015). Politik Ke-Minahasaan dari Waktu ke Waktu: Perspektif Strukturasi, *Jurnal Administrasi Publik*, 4(35).
- Lasut, F. Y. (2022). "Komunikasi Transendental Kampetan Dalam Ritus Minahasa." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24(1).
- Lattu, I. Y. M. (2020). Teologi Tanpa Tinta: Mencari Logos Melalui Etnografi dan Folklore. In P. F. dan Agustinus (Ed.), *Membangun Gereja Sebagai Gerakan Yang Cerdas Dan Solider*. Sanata Dharma University Press.
- Malensang, R. (2016). Dari Gereja Ke Panggung Politik: Studi Tentang Kekuasaan Penatua Dalam Politik Lokal Di Minahasa. *Journal of Gouvernance*, 1(2).
- Marx, K., & Engels, F. (1988). *The Economics and Philosophic Manuscripts of 1844 and The Communist Manifesto* (M. Miligen (ed.)). Prometheus Books.
- Marzuki, I. W. (2020). Perkembangan Manado Masa Kolonial (1789-1949). *Jurnal Tumotowa, Kemendikbud, Go. Id*, 3(1), 57.
- Mawuntu, M. L. (2020). Penetrasi Kekristenan Terhadap Agama Lokal Minahasa. In I. Y. . dan

- T. K. Lattu (Ed.), *Agama dan Budaya Nusantara Pasca Kristenisasi*. Lembaga Studi Sosial dan Agama Press.
- Mckinnon, A. M. (2006). *Opium as Dialectic of Religion: Metaphor, Expression and Protest*. In *Marx, Critical Theory, and Religion*. Brill.
- Morton, A. D. (2007). *Unravelling Gramsci: Hegemony and Passive Revolution in the Global Political Economy*. Pluto Press.
- Muttaqin, A. (1970). Karl Marx Dan Friederich Nietzsche Tentang Agama. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i1.365>
- Nainggolan, Manullang, H. (2021). Sakralitas Burung Manguni Dalam Teologi Kontekstual (tou) Minahasa. *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 1 (2).
- Pantow, B. (1994). Beberapa Perubahan Kebudayaan Di Minahasa Tengah Tahun 1829-1858. In *Universitas Indonesia* (Disertasi). Universitas Indonesia.
- Pinatik, H. J. A. I. Y. M. L. dan R. T. P. (2021). Perubahan Agama Minahasa dan Kekristenan dalam Konstruksi Perjumpaan Simbol Sakral Pada Ritual di Watu Pinawetengan. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 7(2).
- Pinontoan, D. H. R. (2015). MENUJU TEOLOGI IDENTITAS: Kajian atas Rekonstruksi dan Representasi Moral Kristen Barat terhadap Makna Mu'kur di Minahasa. *Indonesian Journal of Theology*, 3 (1), 6.
- _____, D. H. R. (2019a). "*Walian dan Tuang Pandita*": Perjumpaan Agama Minahasa dan Agama Kristen pada Abad XIX. Pustaka Pranala.
- _____, D. H. R. (2019b). *Walian dan Tuang Pandita: Perjumpaan Agama Minahasa Dan Agama Kristen Pada Abad XIX*. Pustaka Pranala.
- _____, D. H. R. (2020). Manguni and Christian Nationalism (in) Minahasa. *Kavanua International Journal of Multicultural Studies*, 1(2), 48–58. <https://doi.org/10.30984/kijms.v2i1.9>
- Rawls, J. (2001). *Justice As Fairness: A Restatement* (E. Kelly (ed.)). Harvard University Press.
- Rothfels, H. and T. E. (1970). "Schriftenreihe Der Vierteijahrsette Fur Zeitgeschichte Nummer 21" "Studien zur Geschichte der Konzentrationslager." In *Das KL Fuhlsbuttel Aufzeichnungen von Dr. Fritz Solmitz im Konzentrationslager Fuhlsbuttel vom 15. Bis 18. 9. 1933*. Deutsche Verlags-Anstalt.
- Schmidt, I. (2020). *Towards a Critique of Marxist Political Economy: Views from the Imperialist* TOWARDS A CRITIQUE OF MARXIST Views from the Imperialist Centre. October 2018. <https://doi.org/10.13169/worldrevipoliecon.9.3.0364>
- Valerian, H. F. (2021). Melihat Kembali Dinamika Kritik Agama Menurut Karl Marx. *Marturia*, III(1).
- Wattimena, R. A. A. (2011). Slavoj Zizek Tentang Manusia Sebagai Subjek Dialektis. *Orientasi Baru*, 20(1).
- Weigel, G., & Grace, D. (1999). *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics* (P. L. Berger (ed.)). Ethics and Public Policy Center Washington, D.C.
- Zizek, S. (1989). *The Sublime Object of Ideology*. Verso.
- _____, S. (1994). *Mapping Ideology* (S. Zizek (ed.)). Verso.
- _____, S. (1997). *The Plague of Fantasies*. Verso.